

Transisi Umayyah-Abbasiyah: Tata Kelola, Ekonomi, dan Pendidikan

Anugrah Giffari¹, Faridi²

^{1,2}Fakultas Agama Islam, Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

Email: ¹anugrahgiffari25@webmail.umm.ac.id, ²faridi_umm@umm.ac.id

(*Email Corresponding Author: faridi_umm@umm.ac.id)

ABSTRAK

Penelitian ini menyajikan sebuah sintesis dari penelitian-penelitian terkini mengenai dinasti Umayyah (661-750 M) dan Abbasiyah (750-1258 M) untuk menantang narasi historiografis tradisional yang seringkali menggambarkan transisi kekuasaan sebagai sebuah diskontinuitas radikal. Dengan mengintegrasikan temuan arkeologis, analisis spasial, kajian numismatik, dan re-evaluasi teks-teks historis, penelitian ini mengemukakan argumen bahwa periode Abbasiyah, yang sering disebut sebagai "Zaman Keemasan Islam", tidak muncul secara ex nihilo. Sebaliknya, ia merupakan hasil dari sebuah proses evolusioner yang kompleks, di mana fondasi-fondasi administratif, arsitektural, ekonomi, dan bahkan intelektual yang diletakkan oleh Dinasti Umayyah secara strategis diadaptasi, diperluas, dan diinstitutionalisasi oleh para penerus mereka, Abbasiyah. Artikel ini secara spesifik menganalisis tiga domain utama: (1) inovasi dalam tata kelola dan arsitektur sebagai instrumen kekuasaan; (2) perkembangan kebijakan ekonomi dan jaringan perdagangan; dan (3) evolusi institusi pendidikan dan keilmuan sebagai studi kasus utama yang merefleksikan dinamika kontinuitas dan perubahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Dinasti Umayyah berperan sebagai arsitek awal kerangka kerja kekaisaran Islam, sementara Dinasti Abbasiyah bertindak sebagai pengembang yang mengkonsolidasikan, mengkosmopolitanakan, dan menginstitutionalisasi kerangka tersebut dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesimpulan ini mengimplikasikan perlunya pergeseran paradigma dalam memahami sejarah peradaban Islam awal, dari narasi revolusi ke narasi evolusi yang terintegrasi.

ABSTRACT

This study presents a synthesis of recent scholarship on the Umayyad (661-750 CE) and Abbasid (750-1258 CE) dynasties to challenge the traditional historiographical narrative, which often portrays the transition of power as a radical discontinuity. By integrating archaeological findings, spatial analysis, numismatic studies, and a re-evaluation of historical texts, this research argues that the Abbasid period, frequently hailed as the "Islamic Golden Age," did not emerge ex nihilo. Rather, it was the result of a complex evolutionary process, wherein the administrative, architectural, economic, and even intellectual foundations laid by the Umayyad Dynasty were strategically adapted, expanded, and institutionalized by their Abbasid successors. This article specifically analyzes three key domains: (1) innovations in governance and architecture as instruments of power; (2) the development of economic policies and trade networks; and (3) the evolution of educational and scholarly institutions as a primary case study reflecting the dynamics of continuity and change. The findings indicate that the Umayyad Dynasty served as the initial architect of the Islamic imperial framework, while the Abbasid Dynasty acted as the developer that consolidated, cosmopolitanized, and institutionalized this framework on an unprecedented scale. This conclusion implies the need for a paradigm shift in understanding the history of early Islamic civilization—from a narrative of revolution to one of integrated evolution.

 OPEN ACCESS

ARTICLE HISTORY

Received: 16-01-2026

Revision: 17-01-2026

Accepted: 21-01-2026

KATA KUNCI:

Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Ekonomi Islam, Pendidikan Islam, Zaman Keemasan Islam.

KEYWORDS:

Umayyad Dynasty; Abbasid Dynasty; Islamic Economy; Islamic Education; Islamic Golden Age

PENDAHULUAN

Sejarah peradaban Islam seringkali dibagi ke dalam periode-periode dinasti yang berbeda, dengan transisi dari Kekhalifahan Umayyah ke Abbasiyah pada tahun 750 M sebagai salah satu titik balik paling signifikan. Narasi klasik, yang sebagian besar dibentuk oleh para sejarawan pro-Abbasiyah, cenderung menggambarkan Dinasti Umayyah sebagai sebuah "kerajaan Arab" (*mulk*) yang sekuler, tiranis, dan menyimpang dari idealisme Islam awal, sementara Revolusi Abbasiyah dipandang sebagai sebuah restorasi keagamaan yang mengantarkan era kosmopolitanisme, keadilan, dan puncak pencapaian intelektual yang dikenal sebagai "Zaman Keemasan Islam" (El-Hibri, 2021; Kennedy, 2016). Paradigma diskontinuitas ini, meskipun berguna untuk simplifikasi historis, telah semakin ditantang oleh gelombang penelitian kontemporer dalam beberapa dekade terakhir.

Penelitian modern, yang didukung oleh metodologi canggih seperti analisis spasial GIS, arkeologi urban, analisis unsur kimia pada koin (numismatik), dan re-evaluasi prosopografis terhadap sumber-sumber primer, mulai melukiskan gambaran yang jauh lebih bernuansa (Alhasanat et al., 2022; Amichay et al., 2019; Jozi et al., 2019). Bukti-bukti baru ini menunjukkan bahwa banyak inovasi yang sering dikaitkan secara eksklusif dengan Abbasiyah sebenarnya memiliki akar yang dalam pada periode Umayyah. Struktur administratif, strategi kontrol teritorial, kebijakan moneter, sintesis artistik, dan bahkan fondasi bagi perkembangan intelektual telah dirintis oleh Umayyah sebagai respons pragmatis terhadap tantangan dalam mengelola sebuah imperium yang luas dan beragam.

Artikel ini bertujuan untuk mensintesis temuan-temuan terbaru tersebut untuk membangun sebuah argumen utama: transisi dari Umayyah ke Abbasiyah harus dipahami bukan sebagai sebuah revolusi yang memutuskan hubungan dengan masa lalu, melainkan sebagai sebuah proses kontinuitas dan transformasi yang dinamis. Dinasti Umayyah meletakkan fondasi struktural yang esensial bagi sebuah kekaisaran Islam, dan Dinasti Abbasiyah, dengan segala inovasinya, pada dasarnya membangun di atas fondasi tersebut, mengadaptasi, memperluas, dan menginstitutionalisasikannya dalam skala dan kecanggihan yang lebih besar.

Untuk membuktikan tesis ini, artikel ini akan disusun ke dalam tiga bagian analisis utama. Bagian pertama akan mengkaji fondasi yang diletakkan oleh Dinasti Umayyah, dengan fokus pada inovasi mereka dalam arsitektur sebagai alat kontrol politik, strategi tata kelola, dan kebijakan ekonomi awal. Bagian kedua akan menganalisis bagaimana Dinasti Abbasiyah mentransformasi warisan ini, mengkonsolidasikan kekuasaan melalui urbanisasi terpusat (pembangunan Baghdad), kebijakan ekonomi yang lebih sistematis, dan pembentukan identitas kekaisaran yang kosmopolitan. Bagian ketiga akan menyajikan studi kasus mendalam mengenai evolusi pendidikan dan institusi keilmuan, dari bentuk-bentuknya yang lebih informal pada masa Umayyah hingga institutionalisasi masif di bawah Abbasiyah, yang secara gamblang mengilustrasikan dialektika antara kontinuitas dan perubahan. Dengan demikian, artikel ini berupaya memberikan kontribusi pada pergeseran historiografis yang sedang berlangsung dalam studi Islam awal, menawarkan kerangka kerja yang lebih terintegrasi untuk memahami perkembangan salah satu peradaban paling berpengaruh dalam sejarah dunia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sintesis literatur sistematis (*systematic literature synthesis*). Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk mengintegrasikan dan menafsirkan kembali temuan-temuan dari berbagai studi empiris dan teoretis yang telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal akademik bereputasi dan buku-buku ilmiah. Prosesnya melibatkan beberapa tahapan:

Identifikasi dan Pengumpulan Sumber: Sumber-sumber primer untuk sintesis ini adalah kumpulan penelitian terbaru yang teridentifikasi melalui basis data akademik seperti Scopus,

sebagaimana disajikan dalam diskusi awal. Fokus diberikan pada penelitian yang diterbitkan dalam dekade terakhir untuk memastikan relevansi dan kebaruan data, mencakup bidang arkeologi, sejarah, studi agama, ekonomi, dan analisis spasial.

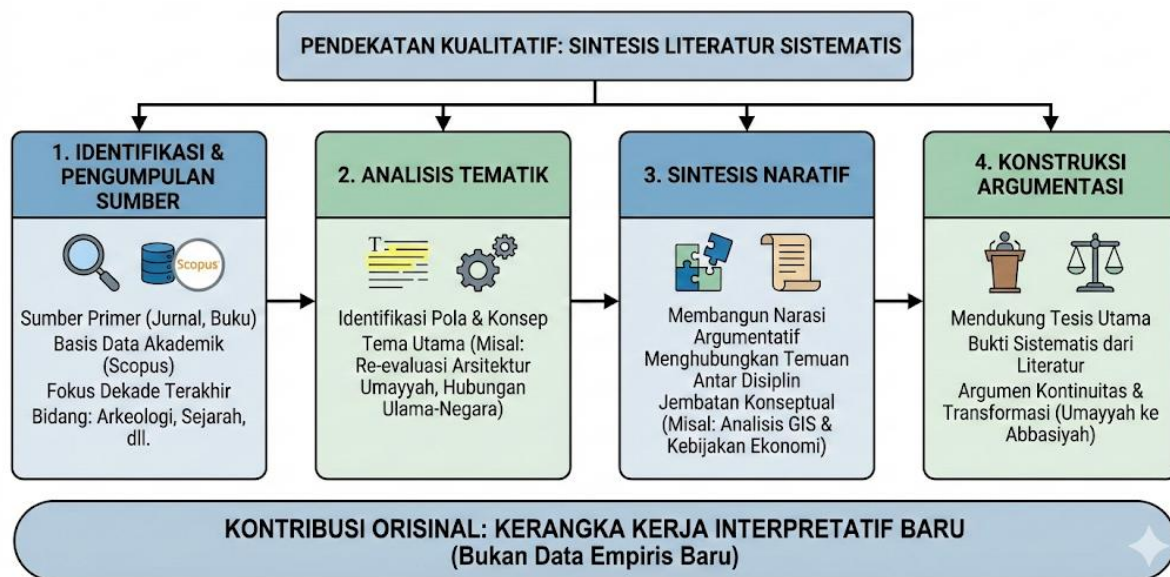
Analisis Tematik: Literatur yang terkumpul kemudian dianalisis secara tematis untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan argumen yang berulang. Tema-tema utama yang muncul adalah: re-evaluasi fungsi arsitektur Umayyah, kompleksitas hubungan antara ulama dan negara, inovasi ekonomi dan moneter, redefinisi warisan Abbasiyah, dan institusionalisasi pengetahuan.

Sintesis Naratif: Berdasarkan analisis tematik, sebuah narasi argumentatif dibangun untuk menghubungkan temuan-temuan yang sebelumnya mungkin terisolasi dalam disiplin ilmu masing-masing. Alih-alih hanya merangkum, sintesis ini secara aktif membangun jembatan konseptual, misalnya, antara analisis GIS tentang istana gurun Umayyah (Alhasanat et al., 2022) dan kebijakan ekspansi ekonomi mereka (Alotaibi, 2020), untuk menunjukkan koherensi strategis dalam pemerintahan Umayyah.

Konstruksi Argumentasi: Narasi yang telah disintesis digunakan untuk membangun dan mendukung tesis utama artikel ini mengenai kontinuitas dan transformasi. Setiap bagian dari artikel secara sistematis menyajikan bukti dari literatur untuk memperkuat argumen bahwa pencapaian Abbasiyah berakar pada fondasi yang diletakkan oleh Umayyah.

Dengan pendekatan ini, artikel ini tidak menghasilkan data empiris baru, tetapi memberikan kontribusi orisinal melalui kerangka kerja interpretatif baru yang mensintesis bukti-bukti yang ada untuk menjawab pertanyaan historiografis yang lebih besar.

Tahapan Penelitian: Sintesis Literatur Sistematis



Gambar 1. Tahapan Penelitian

HASIL

1. Fondasi Umayyah: Inovasi dalam Administrasi, Arsitektur, dan Ekonomi Kekaisaran

Meskipun sering dikritik oleh para sejarawan penerusnya, Dinasti Umayyah adalah arsitek sejati dari aparatur negara kekaisaran Islam. Menghadapi tugas monumental untuk memerintah wilayah yang terbentang dari Semenanjung Iberia hingga perbatasan India, mereka mengembangkan serangkaian strategi pragmatis yang meletakkan dasar bagi administrasi, ekonomi, dan ekspresi budaya kekhalifahan di masa depan (El-Hibri, 2021).

a. Arsitektur sebagai Instrumen Kontrol Politik dan Ekonomi

Salah satu manifestasi paling terlihat dari kekuasaan Umayyah adalah proyek-proyek konstruksi mereka, terutama *qusour* (jamak dari *qasr*), atau yang sering disebut "istana gurun". Interpretasi tradisional memandangnya sebagai vila peristirahatan mewah untuk para khalifah yang melarikan diri dari kehidupan kota. Namun, penelitian arkeologis dan spasial modern secara radikal mengubah pemahaman ini. Menggunakan Geographic Information Systems (GIS), Alhasanah et al. (2022) secara meyakinkan menunjukkan bahwa lokasi *qusour* ini sama sekali tidak acak. Mereka ditempatkan secara strategis di sepanjang rute perdagangan dan transhumansi (perpindahan musiman ternak), serta di dekat sumber-sumber air vital. Penempatan ini menyiratkan fungsi ganda: sebagai pusat pemantauan dan kontrol atas suku-suku Badui yang nomaden, pengamanan jalur kafilah yang krusial bagi ekonomi, dan penegakan kehadiran negara di lanskap pedalaman yang sebelumnya otonom. Dengan demikian, *qusour* bukanlah simbol dekadensi, melainkan pos-pos terdepan dari administrasi kekaisaran yang sedang berkembang.

Wawasan ini diperkuat oleh ekskavasi terbaru di Istana Hisyam (Khirbat al-Mafjar) di Jericho. Hawari (2022) melaporkan bahwa kompleks istana yang megah ini bukanlah monumen yang terisolasi, melainkan bagian integral dari sebuah perkebunan pertanian (*agricultural estate*) yang luas. Temuan ini menggarisbawahi peran istana sebagai pusat pengelolaan ekonomi agraris, yang menghasilkan pendapatan signifikan bagi negara. Ini menunjukkan bahwa Umayyah secara sadar menggunakan pengembangan pertanian dan arsitektur sebagai alat untuk memperluas kekuasaan politik dan administratif mereka, sebuah strategi yang nantinya akan disempurnakan oleh Abbasiyah dalam skala yang lebih besar di sekitar pusat-pusat kota baru mereka. Demikian pula, pekerjaan arkeologi di Cordoba, Spanyol, mengungkapkan jejak pembangunan perkotaan Umayyah, seperti pendirian masjid-masjid sekunder dan pemandian umum, yang menandai transisi dari tata kota era antik akhir ke lanskap urban Islami yang khas (León & Murillo, 2014).

b. Tata Kelola dan Legitimasi Politik

Di ranah politik, narasi konvensional tentang permusuhan universal dari para ulama terhadap Umayyah juga telah dikaji ulang. Penelitian prosopografis oleh Judd (2016) secara cermat mengungkap adanya jaringan ulama yang saleh (*piety-minded scholars*) yang justru mendukung dan bekerja sama dengan kekhalifahan Marwanid (cabang akhir dari Umayyah). Para ulama ini tidak melihat adanya kontradiksi antara kesalehan pribadi dan pelayanan kepada negara. Mereka berkontribusi pada pengembangan awal yurisprudensi Islam sambil mempertahankan hubungan dengan para penguasa. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara otoritas agama dan kekuasaan kekaisaran jauh lebih kompleks dan simbiosis daripada sekadar oposisi. Dengan mendukung ulama-ulama ini, Umayyah secara efektif mulai membentuk kerangka kerja di mana keahlian agama dapat diintegrasikan ke dalam aparatur negara, sebuah praktik yang menjadi ciri khas pemerintahan Abbasiyah di kemudian hari.

Legitimasi Umayyah juga sangat terkait dengan keberhasilan militer. Mereka memadukan legitimasi politik dengan kehebatan militer, seringkali membenarkan kebijakan ekspansionis mereka melalui doktrin takdir ilahi (*divine providence*) (Kader, 2025). Ekspansi besar-besaran di bawah Khalifah Al-Walid bin Abdul-Malik (memerintah 705-715 M) secara signifikan meningkatkan kekayaan dan sumber daya negara melalui rampasan perang dan pajak dari wilayah-wilayah baru (Alotaibi, 2020). Meskipun strategi agresif ini pada akhirnya memicu ketidakpuasan internal yang berkontribusi pada kejatuhan mereka, ia berhasil menciptakan sebuah imperium tunggal yang terintegrasi secara ekonomi dan politik, yang kemudian diwarisi secara utuh oleh Abbasiyah.

c. Fondasi Ekonomi: Moneter dan Perdagangan

Secara ekonomi, Umayyah mengambil langkah-langkah krusial menuju penciptaan sistem ekonomi kekaisaran yang terpadu. Salah satu yang paling penting adalah reformasi moneter di bawah Khalifah Abd al-Malik, yang memperkenalkan koin emas (dinar) dan perak (dirham) dengan tulisan Arab murni, menggantikan koin-koin Bizantium dan Sassanid yang telah

dimodifikasi sebelumnya. Analisis metalurgi modern terhadap koin-koin ini memberikan wawasan tentang kesehatan ekonomi negara. Studi oleh Jozi et al. (2019) menggunakan metode PIXE (Particle-Induced X-ray Emission) untuk menganalisis kandungan perak dalam dirham Umayyah dan menemukan bahwa kandungan perak yang tinggi dan konsisten menunjukkan ekonomi yang stabil dan kuat selama periode-periode tertentu. Stabilitas moneter ini sangat penting untuk memfasilitasi perdagangan jarak jauh dan mengintegrasikan berbagai provinsi ke dalam satu zona ekonomi. Ini adalah infrastruktur moneter yang diwarisi dan terus digunakan oleh Abbasiyah selama berabad-abad.

Singkatnya, periode Umayyah bukanlah masa stagnasi atau penyimpangan belaka. Itu adalah periode formatif yang krusial di mana cetak biru untuk sebuah kekaisaran Islam meliputi kontrol teritorial melalui arsitektur strategis, integrasi awal otoritas agama, legitimasi berbasis ekspansi, dan sistem moneter terpadu pertama kali digambar dan diimplementasikan.

2. Transformasi Abbasiyah: Konsolidasi, Kosmopolitanisme, dan Puncak Intelektual

Revolusi Abbasiyah pada tahun 750 M secara tak terbantahkan membawa perubahan besar dalam orientasi politik dan budaya kekhalifahan. Pusat kekuasaan bergeser dari Damaskus yang berorientasi Mediterania ke Baghdad di Mesopotamia, sebuah lokasi yang secara simbolis dan geografis lebih dekat ke jantung tradisi kekaisaran Persia kuno. Namun, alih-alih menghapus warisan Umayyah, Abbasiyah secara cerdas membangun di atasnya (Kader, 2025).

a. Historiografi Baru dan Konsolidasi Kekuasaan

Sejarawan modern seperti El-Hibri (2021) berpendapat bahwa kita harus bergerak melampaui narasi sederhana tentang "zaman keemasan" yang diikuti oleh "kemunduran". Kekhalifahan Abbasiyah adalah sebuah institusi yang kompleks dan tangguh yang pengaruhnya bertahan lama bahkan setelah kekuatan politik langsungnya memudar. Salah satu kunci keberhasilan awal mereka adalah kemampuan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dengan cara yang lebih sistematis daripada pendahulu mereka. Pendirian Baghdad pada tahun 762 M adalah sebuah langkah jenius. Sebagai "Kota Damai" (*Madinat al-Salam*), ia dirancang sebagai pusat administrasi, ekonomi, dan intelektual dari sebuah imperium yang sadar diri. Lokasinya di persimpangan jalur darat dan air utama memungkinkannya berfungsi sebagai "pusat dunia" yang menghubungkan perdagangan dari Semenanjung Iberia hingga perbatasan Cina (Yurtseven, 2024).

Struktur birokrasi, yang embrionya sudah ada di bawah Umayyah, diperluas dan disistematisasi secara masif di bawah Abbasiyah, seringkali dengan mempekerjakan keluarga-keluarga Persia yang berpengalaman seperti Barmakid (Stasolla, 2010). Mereka menciptakan departemen-departemen (*diwan*) yang terspesialisasi untuk mengelola keuangan, tentara, pos, dan administrasi provinsi. Ini adalah evolusi, bukan penciptaan *ex nihilo*, dari sistem administratif yang telah dirintis oleh para gubernur Umayyah.

b. Ekspansi Ekonomi dan Dinamisme Perdagangan

Jika Umayyah menciptakan zona ekonomi tunggal, Abbasiyah-lah yang mengoptimalkannya. Kebijakan-kebijakan yang mendukung perdagangan, seperti standardisasi berat dan ukuran, pengurangan pajak internal (*bea cukai*), dan keamanan jalur perdagangan, mendorong ledakan aktivitas ekonomi (Ghorbannejad, 2025). Temuan arkeologis dari sebuah pasar Abbasiyah di Yerusalem memberikan bukti nyata dari dinamisme ini. Analisis sisa-sisa tanaman yang terawat dengan baik mengungkapkan pola konsumsi dan perdagangan yang canggih, termasuk penemuan terong paling awal di Levant, yang menunjukkan adanya pengenalan tanaman baru melalui jaringan perdagangan yang luas (Amichay et al., 2019).

Karya-karya intelektual dari periode itu sendiri, seperti risalah *al-Tabassur bi't-Tijarah* (Wawasan tentang Perdagangan) oleh al-Jāhiz, mencerminkan kesadaran mendalam tentang geografi ekonomi dan pentingnya perdagangan internasional. Yurtseven (2024) menganalisis karya ini dan menunjukkan bagaimana para pemikir Abbasiyah secara sistematis memetakan rute komersial, komoditas, dan hubungan ekonomi, menandakan bahwa perdagangan

bukan lagi sekadar aktivitas, tetapi subjek studi yang penting bagi negara. Ini adalah tingkat kecanggihan ekonomi yang dibangun di atas fondasi jaringan dan stabilitas moneter yang diwarisi dari Umayyah.

c. Sintesis Budaya dan Fondasi Intelektual

Periode Umayyah ditandai oleh sintesis artistik awal, di mana gaya Helenistik, Romawi-Bizantium, dan Persia mulai menyatu menjadi estetika Islam yang baru, seperti yang terlihat dalam mosaik Kubah Batu dan Masjid Agung Damaskus (Ali, 2025). Abbasiyah mengambil proses sintesis ini ke tingkat yang sama sekali baru, tidak hanya dalam seni, tetapi juga dalam bidang intelektual. Pergeseran ke timur membawa pengaruh Persia yang lebih kuat, menciptakan budaya kekaisaran yang benar-benar kosmopolitan, di mana orang Arab, Persia, Suriah, dan lainnya berkontribusi dalam bahasa Arab sebagai *lingua franca* universal.

Ini menciptakan lingkungan yang matang untuk ledakan intelektual. Abbasiyah tidak hanya melestarikan pengetahuan, tetapi secara aktif mencarinya. Gerakan Penerjemahan yang legendaris, yang berpusat di institusi seperti Bayt al-Hikmah (Rumah Kebijakan), adalah proyek yang disponsori negara untuk menerjemahkan karya-karya ilmiah dan filosofis dari bahasa Yunani, Suryani, Pahlavi (Persia), dan Sansekerta ke dalam bahasa Arab (Algeriani & Mohadi, 2019). Ini bukanlah sekadar tindakan pelestarian; itu adalah upaya sadar untuk menyerap, mengkritik, dan membangun di atas warisan intelektual dunia kuno untuk memecahkan masalah-masalah kontemporer dalam kedokteran, astronomi, matematika, dan teknik. Bahkan selama periode tantangan politik, seperti pada masa Khalifah al-Mutawakkil, kegiatan penerjemahan dan sains terus berkembang, menunjukkan betapa dalamnya ilmu pengetahuan telah terlembagakan (Şenel, 2025).

Dengan demikian, transformasi Abbasiyah adalah proses pendalaman, perluasan, dan institusionalisasi. Mereka mengambil struktur kekaisaran Umayyah yang lebih longgar dan pragmatis, dan mengubahnya menjadi mesin birokrasi, ekonomi, dan intelektual yang sangat terorganisir dan sadar diri.

3. Studi Kasus dalam Kontinuitas dan Perubahan: Evolusi Pendidikan dari Umayyah ke Abbasiyah

Evolusi pendidikan dan institusi keilmuan berfungsi sebagai mikrokosmos yang sempurna untuk mengilustrasikan tesis utama artikel ini. Ia menunjukkan dengan jelas bagaimana struktur informal yang muncul pada masa Umayyah menjadi dasar bagi sistem kelembagaan yang canggih di bawah Abbasiyah (El-Hibri, 2021).

a. Pendidikan pada Masa Umayyah: Fondasi Informal

Pendidikan pada masa Umayyah sebagian besar bersifat informal dan terdesentralisasi. Pusat-pusat pembelajaran utama adalah masjid, di mana para ulama mengadakan lingkaran studi (*halaqah*) untuk mengajarkan Al-Qur'an, Hadis, dan dasar-dasar hukum Islam. Seperti yang ditunjukkan oleh Judd (2016), para ulama ini, baik yang mendukung maupun yang menentang negara, memainkan peran penting dalam transmisi pengetahuan agama dan membentuk kesadaran hukum-moral komunitas Muslim. Selain itu, istana-istana khalifah dan gubernur juga berfungsi sebagai pusat budaya, di mana para penyair dan ahli silsilah berkumpul. Peran fundamental Umayyah dalam menyebarkan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi dan agama di seluruh kekaisaran (Judd, 2016) secara tidak sengaja menciptakan prasyarat linguistik yang esensial untuk ledakan intelektual yang akan datang. Tanpa bahasa Arab yang terstandarisasi dan tersebar luas, gerakan penerjemahan dan produksi sastra skala besar pada masa Abbasiyah tidak akan mungkin terjadi.

b. Institusionalisasi Pendidikan pada Masa Abbasiyah

Abbasiyah mewarisi lanskap pendidikan yang didominasi oleh ulama dan didukung oleh komunitas ini, lalu mereka menambahinya dengan dua lapisan institusional yang kuat: sponsor negara dan wakaf sipil (El-Hibri, 2021).

Bayt al-Hikmah (Rumah Kebijaksanaan): Institusi ini, yang mencapai puncaknya di bawah Khalifah al-Ma'mun, adalah contoh utama dari sponsor negara terhadap pendidikan tinggi dan penelitian. Ini bukan hanya sebuah perpustakaan atau pusat terjemahan, tetapi sebuah akademi sains di mana para sarjana dari berbagai latar belakang agama dan etnis bekerja sama dalam proyek-proyek intelektual (Algeriani & Mohadi, 2019). Pendiriannya menandai pergeseran kualitatif: dari pembelajaran yang didorong oleh kebutuhan agama dan komunitas menjadi penelitian yang didorong oleh rasa ingin tahu intelektual dan kebutuhan strategis negara (misalnya, astronomi untuk navigasi dan penentuan waktu, matematika untuk rekayasa dan pembagian waris). Kontribusi para khalifah secara pribadi dalam mendukung perpustakaan dan para sarjana adalah faktor kunci dalam berkembangnya keilmuan (Osman & Mohadi, 2018).

Pendidikan Berbasis Wakaf: Seiring berjalannya waktu, terutama dari abad ke-11 dan ke-12, sebuah inovasi sosio-legal yang signifikan mengubah wajah pendidikan: penggunaan wakaf (endowment) untuk mendanai institusi pendidikan. Amezzian (2024) menyoroti bagaimana wakaf memungkinkan pendirian madrasah-madrasah yang independen secara finansial dari kontrol langsung negara. Institusi-institusi ini, seperti Nizamiyyah di Baghdad, mengkhususkan diri dalam bidang-bidang tertentu (terutama hukum dan teologi) dan mengembangkan kurikulum yang lebih formal. Ini adalah respons terhadap kebutuhan sosio-politik pada masanya, yaitu untuk melatih kelas birokrat dan hakim yang terdidik (Alatas, 2021) dan untuk melawan penyebaran doktrin-doktrin teologis saingan. Institusi serupa juga muncul dalam komunitas non-Muslim di bawah pemerintahan Abbasiyah, seperti *yeshiva* (akademi Talmud) Yahudi di Babilonia, yang juga berkembang pesat selama periode ini (Arslantaş, 2015).

Transisi ini menunjukkan pola yang jelas: fondasi diletakkan oleh Umayyah melalui penyebaran bahasa Arab dan pembentukan komunitas ulama awal. Abbasiyah kemudian membangun di atas fondasi ini dengan menciptakan lembaga-lembaga formal baik yang disponsori negara (Bayt al-Hikmah) maupun yang didanai secara sipil (madrasah berbasis wakaf) yang membawa pendidikan dan penelitian ke tingkat kecanggihan dan skala yang belum pernah ada sebelumnya. Kurikulumnya, yang mengintegrasikan studi agama dengan filsafat dan sains (Khoury, 2019), dan pedagoginya yang seringkali menekankan debat dan pemikiran kritis (Baiza, 2022), pada akhirnya memiliki dampak mendalam tidak hanya di dunia Islam tetapi juga di Eropa melalui transmisi pengetahuan (Bernards, 2013).

PEMBAHASAN

Sintesis yang disajikan dalam artikel ini memiliki beberapa implikasi penting bagi studi sejarah Islam. Pertama, ia menantang dikotomi sederhana antara Umayyah yang "sekuler" dan Abbasiyah yang "saleh" atau Umayyah yang "Arab" dan Abbasiyah yang "kosmopolitan". Sebaliknya, ia menyarankan sebuah model evolusioner di mana kedua dinasti merupakan fase-fase yang saling berhubungan dalam proses pembangunan peradaban yang panjang. Umayyah adalah para perintis yang beradaptasi dengan tantangan kekaisaran, sementara Abbasiyah adalah para konsolidator dan inovator yang menyempurnakan dan memperluas struktur yang mereka warisi.

Kedua, pemahaman ini menekankan pentingnya melihat melampaui narasi tekstual yang seringkali bias secara politik dan mengintegrasikan bukti material dari arkeologi, numismatik, dan studi spasial. Bukti-bukti ini seringkali menceritakan kisah yang berbeda-beda tentang pragmatisme, adaptasi, dan kontinuitas struktural yang tidak selalu terlihat dalam kronik-kronik sejarah.

Berdasarkan analisis ini, beberapa arah penelitian masa depan dapat diidentifikasi:

Studi Komparatif Administrasi Provinsi: Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk membandingkan secara rinci struktur dan praktik administrasi di tingkat provinsi antara akhir periode Umayyah dan awal periode Abbasiyah untuk melacak secara konkret elemen-elemen kontinuitas dan perubahan dalam aparatur negara.

Peran Aktor Non-Elit: Sebagian besar penelitian berfokus pada khalifah, ulama, dan birokrat. Studi di masa depan dapat mengeksplorasi peran pedagang, pengrajin, dan petani dalam membentuk transisi ekonomi dan sosial antara kedua dinasti.

Transmisi Pengetahuan Administratif: Bagaimana pengetahuan dan praktik birokrasi ditransfer selama Revolusi Abbasiyah? Studi mendalam tentang karir individu-individu yang melayani kedua rezim dapat memberikan wawasan berharga tentang mekanisme kontinuitas personel dan kelembagaan.

Ekologi dan Infrastruktur: Memperluas analisis GIS yang diterapkan pada *qusour* Umayyah ke proyek-proyek infrastruktur lain seperti sistem irigasi, jalan, dan pembangunan kota dapat lebih jauh menerangi strategi ekonomi dan politik jangka panjang dari kedua kekhalifahan.

KESIMPULAN

Penelitian-penelitian terbaru telah secara fundamental mengubah pemahaman kita tentang Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Jauh dari sekadar periode transisi yang ditandai oleh diskontinuitas radikal, bukti-bukti baru menunjukkan adanya benang merah kontinuitas yang kuat yang menghubungkan kedua era tersebut. Dinasti Umayyah, dalam upayanya mengelola sebuah imperium yang baru lahir, meletakkan fondasi-fondasi yang sangat penting: mereka mengembangkan arsitektur sebagai alat kontrol, memulai integrasi ulama ke dalam urusan negara, menciptakan sistem moneter terpadu, dan menyebarkan bahasa Arab sebagai pemersatu.

Dinasti Abbasiyah, tidak memulai dari nol, membangun secara ekstensif di atas fondasi ini. Mereka memusatkan administrasi di Baghdad, mengoptimalkan jaringan perdagangan yang telah ada, dan yang terpenting, menginstitusionalisasikan kehidupan intelektual dan pendidikan yang sebelumnya lebih informal. "Zaman Keemasan" Abbasiyah, dengan pencapaiannya yang gemilang dalam sains, filsafat, dan sastra, dengan demikian bukanlah sebuah keajaiban yang tiba-tiba, melainkan puncak dari proses evolusioner yang akhirnya tertanam kuat pada periode formatif Umayyah. Memahami dialektika antara fondasi Umayyah dan transformasi Abbasiyah ini tidak hanya memberikan gambaran yang lebih akurat dan bernuansa tentang sejarah Islam awal, tetapi juga menawarkan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika umum pembangunan peradaban, di mana inovasi seringkali merupakan hasil dari adaptasi dan pengembangan warisan masa lalu.

REFERENCES

- AbdulAziz Algeriani, A. M., & Mohadi, M. (2019). The House of Wisdom (Bayt al-Hikmah), an educational institution during the time of the Abbasid dynasty. A historical perspective. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 27(2), 1263–1276. <https://doi.org/10.47836/pjssh.27.2.33>
- Alatas, A. (2021). Education and socio-political change in the 11th and 12th centuries abbasid realm. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 11(1), 216–234. <https://doi.org/10.32350/jitc.11.1.12>
- Alhasanah, M. B., Kabir, S., Hussin, W. M. A. W., & Addison, E. (2022). Spatial analysis of a historical phenomenon: Using GIS to demonstrate the strategic placement of Umayyad desert palaces. *GeoJournal*, 77(5), 685–701. <https://doi.org/10.1007/s10708-011-9426-5>
- Ali, N. (2025). THE VISUAL ARTS OF Umayyad SYRIA. In *The Oxford Handbook of the Hellenistic and Roman Near East*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190689528.013.29>
- Alotaibi, H. (2020). Umayyad conquests in the era of Al-Walid bin Abdul-Malik: Its economic and social impact on the Umayyad state from 86 AH to 96 AH (705 AD-715 AD). *Islamic Quarterly*, 64(4), 487–505.

- Amezian, M. (2024). Waqf in Higher Educational Institutions: Factors of Development in the Abbasid Era (334-656 AH). *Islamic Studies*, 63(1), 25–48. <https://www.jstor.org/stable/27231401>
- Amichay, O., Ben-Ami, D., Tchekhanovets, Y., Fuks, D., & Weiss, E. (2019). A bazaar assemblage: Reconstructing consumption, production and trade from mineralised seeds in Abbasid Jerusalem. *Antiquity*, 93(367), 197–215. <https://doi.org/10.15184/aqy.2018.261>
- Arslantaş, N. (2015). Institutions of Jewish higher religious education in Abbasid Period: The yeshivas. *Belleten*, 79(285), 443–456. <https://doi.org/10.37879/belleten.2015.443>
- Baiza, Y. (2022). Are Contemporary Islamic Education and Their Pedagogical Approaches Fit for Purpose? A Critique and Way Forward. In *Supporting Modern Teaching in Islamic Schools: Pedagogical Best Practice for Teachers* (pp. 3–18). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003260845-2>
- Bernards, M. (Ed.). (2013). *‘Abbasid Studies IV: Occasional Papers of the School of ‘Abbasid Studies Leuven, July 5-July 9, 2010*. Gibb Memorial Trust.
- El-Hibri, T. (2021). *The Abbasid Caliphate: A History*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781316869567>
- Ghorbannejad, P. (2025). STUDY OF THE ECONOMIC SITUATION OF ARMENIA AND ARRAN DURING THE 10th CENTURY AD. *History, Archeology and Ethnography of the Caucasus*, 21(1). <https://doi.org/10.32651/2712-8907-2025-21-1-125-134>
- Hawari, M. (2022). A Summary Report–PEF Grant: ‘Khirbat al-Mafjar Archaeological Project, Jericho.’ *Palestine Exploration Quarterly*, 154(4), 302–321. <https://doi.org/10.1080/00310328.2022.2134988>.
- Jozi, Z., Khak, P. M., & Nosrati, A. (2019). Elemental analysis of silver coins during the umayyads through the pixe method. *Interdisciplinaria Archaeologica*, 10(2), 159–165. <https://doi.org/10.24916/iansa.2019.2.6>
- Judd, S. C. (2016). Umayyad Caliphate. In *The Encyclopedia of Empire*. Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781118455074.wbeoe148>
- Kader, M. K. (2025). The Rashidun, Umayyad (661-750) and Abbasid (750-1258) Caliphates. In I. M. Mansoor (Ed.), *The Cambridge History of Strategy: Volume I: From Antiquity to the American War of Independence*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009383637.013>
- Kennedy, H. (2016). *The Early Abbasid Caliphate: A Political History*. Routledge.
- Khoury, L. A.-A. (2019). Education during the Arab Renaissance and its path to the west. *International Journal of Islamic Thought*, 16, 1–14. <https://doi.org/10.24035/ijit.16.2019.167>.
- León, A., & Murillo, J. F. (2014). Advances in research on Islamic Cordoba. *Journal of Islamic Archaeology*, 1(2), 183–214. <https://doi.org/10.1558/jia.v1i2.183>.

- Osman, R. B. A. H., & Mohadi, M. (2018). The significant contribution of Caliphs in the efflorescence of muslim librarianship: A historical account. *Intellectual Discourse*, 26(2), 827–846. <https://doi.org/10.31436/id.v26i3.1205>.
- Şenel, S. (2025). Science Expanding Amid Political Challenges: Translation Activities During the al-Mutawakkil ‘Alā’llāh Period (232–247 H/847–861 CE). *Religions*, 16(1), 1–15 <https://doi.org/10.3390/rel16010021>.
- Stasolla, M. G. (2010). Categories and functions in the state apparatus during Barmecides: A survey on the shift between roles. *Al-Masaq: Journal of the Medieval Mediterranean*, 22(3), 257–273 <https://doi.org/10.1080/09503110.2010.523351>.
- Yurtseven, M. (2024). A Spatial Approach to the Economic Geography of the ‘Abbāsīd Era and Islamic Economic Thought: A Study on Jāhīz’s Work al-Tabassur bi’t-Tijārah. *Hitit Theology Journal*, 23(1), 1–28. <https://doi.org/10.14395/hitit.1501235>
- .